

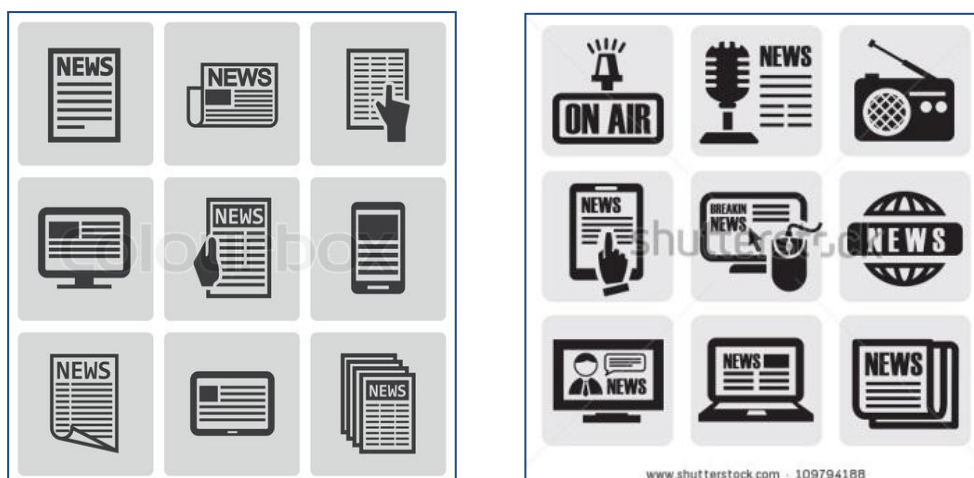


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Politik

Senin, 8 September 2014



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2014**

Daftar Isi

1. PEMERINTAH BARU PERLU SIAPKAN SKEMA PEMBIAYAAN UNTUK PETANI (*Media Online Indonesia Finance Today*)

PEMERINTAH BARU PERLU SIAPKAN SKEMA PEMBIAYAAN UNTUK PETANI



DECIDE NOW

subscribe dan download aplikasi Android & iOS di : www.ift.co.id

Untuk berlangganan koran Indonesia Finance Today hubungi 021-700 95499



INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Senin, 8 September 2014

Halaman 24 Kolom 1-5

Pemerintah Baru Perlu Siapkan Skema Pembiayaan untuk Petani

J. Edo Nur Karesna

JAKARTA – Presiden terpilih Joko Widodo perlu menyiapkan skema pembiayaan untuk sektor pertanian. Selama ini, petani sulit mendapatkan pembiayaan karena tidak *feasible* bagi perbankan.

Pemerintah baru menyiapkan langkah-langkah nyata untuk mendorong sektor pertanian. Pengamat menilai skema pembiayaan untuk petani dan infrastruktur dasar adalah dua persoalan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah baru.

Hendri Saparini, Direktur Eksekutif Centre of Reform on Economics (CORE), mengungkapkan bahwa pemerintah baru perlu melakukan terobosan untuk mendorong tumbuhnya sektor pertanian. Selama ini, pertanian mengalami stagnasi pertumbuhan, bahkan tenaga kerja di bidang pertanian semakin berkurang.

Pada 2013, sektor pertanian hanya tumbuh 3,54% dan berkontribusi 14,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga pertanian pada 2013 sebesar 26,13 juta keluarga. Dalam 10 tahun, rumah tangga pertanian turun sebesar 5,04 juta keluarga.

Hendri menilai lambatnya pertumbuhan sektor pertanian ini disebabkan minimnya fasilitas pembiayaan yang tersedia bagi petani. Untuk mengatasi permasalahan itu, dia mengusulkan agar pemerin-



Lambatnya pertumbuhan sektor pertanian ini disebabkan minimnya fasilitas pembiayaan yang tersedia bagi petani. www.ift.co.id

tah menggunakan PT Bank BRI Tbk (BBRI) untuk menyiapkan fasilitas pembiayaan bagi petani.

"Bank BRI sudah punya infrastruktur hingga tingkat desa, kepemilikan pemerintah juga masih 52%. Ini akan lebih efektif dari sisi pengeluaran," jelas Hendri kepada IFT, akhir pekan lalu.

Dia juga mengusulkan agar Undang-undang (UU) Nomor 1

Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ditinjau ulang. Sebab, undang-undang tersebut belum menjamin inklusivitas pembiayaan, khususnya untuk sektor pertanian.

Pemerintah baru juga perlu melakukan realokasi anggaran untuk merangsang pertumbuhan sektor pertanian. Infrastruktur dasar petan-

tersebut merupakan persoalan yang pertama dikerjakan pemerintah mendatang.

"Ada dana kemiskinan Rp 140 triliun. Kalau mau mengentaskan kemiskinan, dana tersebut bisa dialihkan ke pertanian, tenaga kerja juga akan banyak terbuka," kata Hendri.

Joko Widodo menargetkan dalam empat tahun, pemerintah baru dapat menyelesaikan persoalan

mendasar seperti kepemilikan lahan, luas lahan, ketersediaan pupuk, dan irigasi. Selain itu, dia juga menjelaskan pemerintah akan membuat mekanisme baru untuk menjaga harga jual komoditas pertanian dapat terjaga dengan baik.

"Ke depan program pemerintah pusat perlu diarahkan karena 100% karena ada kebutuhan petani yang benar-benar riil dan konkret," kata Jokowi.

Tim Transisi

Pekan ini, Tim Transisi akan mengadakan pertemuan dengan Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Perekonomian, setelah pertemuan pekan lalu dibatalkan. Selain dengan Chairul Tanjung, Tim Transisi juga akan bertemu dengan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM dan Sudi Silalahi, Menteri Sekretaris Negara.

Chairul menjelaskan bahwa pintu masuk Tim Transisi hanya melalui tiga Menteri yang ditunjuk tersebut. "Dalam gaya Pak SBY, semua sudah *centralized* di pintu-pintu yang sudah disediakan," kata Chairul.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki wewenang atas kebijakan-kebijakan yang diambil hingga 20 Oktober. Sehingga, presiden terpilih dapat melakukan penyesuaian kebijakan setelah dilantik atau melalui mekanisme perubahan pada masa pemerintahan mendatang. ●

Presiden terpilih perlu menyiapkan skema pembiayaan untuk sektor pertanian. Selama ini petani, sulit mendapatkan pembiayaan karena tidak feasible bagi perbankan

Hashtag Berita :

#TransisiPemerintahan

#RKP(RencanaKegiatanPemerintah)

#KetahananPangan

#KedaulatanAgraria